

BAB II

DONALD TRUMP DAN SEJARAH KEBIJAKAN MIGRASI AMERIKA SERIKAT

Di dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai perkembangan kebijakan migrasi yang terjadi di Amerika Serikat. Arus migrasi yang terus meningkat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap suatu negara, dengan demikian adanya migrasi internasional menjadi salah satu ancaman terhadap stabilitas keamanan suatu negara, salah satunya yaitu Amerika Serikat yang menjadi salah satu negara tujuan bagi para migran dari seluruh penjuru dunia. Maka dari itu, untuk menangani isu migrasi terdapat aturan maupun kebijakan kemigrasian yang dibuat oleh pemerintahan Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump.

2.1 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

2.1.1 Kebijakan Luar Negeri Era Pemerintahan Donald Trump

Pada masa pemerintahan Donald Trump, kebijakan cenderung lebih tegas terhadap para migran yang mencari klaim suaka di Amerika Serikat, sikap dan tindakan Donald Trump yang terlihat keras menimbulkan kesan bahwa Donald Trump sangat ingin mewujudkan “*Make America Great Again*”. Saat pemilihan umum presiden Amerika Serikat 2016 yang lalu, terdapat beberapa isu prioritas yang disuarakan oleh Donald Trump akan tetapi isu terkait migrasi merupakan salah satu isu yang paling kompleks selain isu-isu seperti ekonomi, sistem kesehatan, aborsi, terorisme dan hak minoritas (Jones, 2015). Selain itu, isu perbatasan juga menjadi isu yang diangkat dengan prioritas tinggi khususnya oleh para kandidat dari partai republik. Sejak pemerintahan Donald Trump terdapat beberapa perintah eksekutif (*Executive Order*) yang menimbulkan banyak respon hingga protes. Pada September 2017, presiden Donald Trump membatalkan perintah eksekutif

(*Executive Order*) yang dikeluarkan oleh Barack Obama yaitu terkait *Deffered Action for Childhood Arrivals (DACA)*, dimana keputusan tersebut menuai protes di seluruh negeri karena dianggap tidak adil dan dapat merugikan perekonomian (Claire Felter, 2021). Hal tersebut juga sempat terjadi penundaan dalam keputusan pembatalan program ini, namun akhirnya pada Juni 2020, Mahkamah Agung memutuskan bahwa keputusan Donald Trump untuk mengakhiri program DACA dinilai sewenang-wenang dalam menangani isu migrasi (VOA, 2020).

2.1.2 Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Guatemala

Guatemala dan Amerika Serikat menjalin hubungan pertama kali saat Guatemala menjadi salah satu anggota republik federasi Amerika Tengah. Amerika Serikat mengakui federasi ketika Presiden Jame Monroe menerima Antonio Jose Canaz sebagai utusan luar biasa dan menteri berkuasa penuh pada agustus 4 agustus 1824. Pemerintahan Presiden Justo Rufino Barrios tahun 1873 sampai 1885 memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat dengan adanya keterbukaan keahlian asing dalam mengembangkan infrastruktur Guatemala. Pemerintah Guatemala mendorong impor peralatan pertanian modern dari Amerika Serikat dan juga teknisi dari Amerika Serikat turut membantu memasang lampu listrik dan pembuatan selokan di *Guatemala city*.

Krisis ekonomi pada tahun 1929 membuat perekonomian Guatemala juga ikut menurun dan mengakibatkan banyaknya pengangguran di seluruh penjuru negeri. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Guatemala melaporkan ada keresahan di antara kelas-kelas pekerja. Pada tahun 1947, Amerika Serikat dan Guatemala menandatangani sebuah perjanjian traktat bantuan timbal balik Inter-amerika atau yang dikenal sebagai Perjanjian Rio. Hubungan kerjasama ini berlanjut selama tiga dasawarsa dengan adanya hubungan militer yang erat diantara kedua negara ini. Hal ini dapat dilihat adanya personil militer Amerika Serikat yg ditugaskan sebagai penasihat pasukan militer

di Guatemala. Amerika Serikat turut serta memberikan persenjataan dan hampir semua pasukan militer Guatemala menggunakan peralatan militer Amerika Serikat secara eksklusif. Pasukan militer Guatemala juga diberikan pendidikan dan pelatihan militer internasional (IMET atau *International Military Education and Training*). Serta bantuan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat disaat Guatemala mengalami ketidakstabilan (Noora Lori, 2020).

2.1.3 Hubungan Guatemala dan Amerika Serikat Kontemporer

Ketika berakhirnya perang dingin pada tahun 1990-an Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat bergeser dari militer menjadi *peacebuilding* dimana hal ini terjadi ketika presiden Clinton meminta maaf saat ia berkunjung ke Guatemala pada tahun 1998 karena adanya peran militer Amerika Serikat dalam pelanggaran hak asasi manusia termasuk genosida selama perang sipil di Guatemala berlangsung (Janzen, 2014). Hubungan AS-Guatemala berlanjut hingga tergabungnya Amerika Serikat sebagai anggota "*friends of Guatemala*" bersama dengan Kolombia, Meksiko, Spanyol, Norwegia dan Venezuela yang ikut berperan penting dalam perjanjian perdamaian perang sipil Guatemala tahun 1996. Setelah adanya perjanjian itu Amerika Serikat berkomitmen memberikan bantuan US \$500 juta untuk mendukung pelaksanaan perdamaian sejak tahun 1997 (Streeter, 1999). Sebagian besar bantuan tersebut diberikan melalui kantor USAID untuk Guatemala Bantuan tersebut berjalan sampai 2017 saja.

Guatemala memiliki potensi sebagai ekonomi dan mitra dagang terbesar Amerika Tengah di Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memberikan bantuan ekonomi melalui kerjasama ekonomi berupa perjanjian perdagangan bebas yaitu CAFTA-DR, keseimbangan telah bergeser mendukung Amerika Serikat (Johnson, 2019). Perjanjian CAFTA-DR ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dan integrasi regional lebih lanjut dengan menghilangkan tarif, membuka pasar, mengurangi hambatan terhadap layanan dan mempromosikan transparansi

CAFTA-DR berisi mengenai investasi dengan perjanjian investasi bilateral dengan Amerika Serikat yang mirip dengan perjanjian investasi bilateral dengan Amerika Serikat. Ekspor Amerika Serikat ke Guatemala termasuk minyak, produk pertanian (States, 2018).

Pada tahun 2016 lalu, total perdagangan Guatemala dan Amerika Serikat mencapai 9,8 milyar US\$. Ekspor Guatemala ke Amerika Serikat berjumlah sekitar \$ 3,9 miliar, dengan pisang, pisang raja, pakaian rajut, pakaian tenunan, kopi, perak, dan emas untuk mayoritas. Impor Guatemala dari Amerika Serikat berjumlah \$ 5,8 miliar. Mayoritas yang diimpor dari Amerika Serikat ialah bahan bakar mineral, mesin listrik, artikel yang disumbangkan untuk bantuan, mesin, dan sereal sedangkan dari bidang pertanian ialah jagung, bungkil kedelai, gandum, unggas, dan kapas. Guatemala adalah mitra dagang terbesar ke-43 Amerika Serikat pada tahun 2016 (Johnson, 2019).

Guatemala merupakan negara yang cenderung bergantung terhadap bantuan ekonomi dari Amerika Serikat hal tersebut dikarenakan Guatemala merupakan negara yang memiliki pemerintahan yang lemah, miskin, rawan akan pangan dan akses yang cenderung tidak merata terhadap peluang ekonomi dan layanan sosial yang ada. Banyak masalah yang terjadi di Guatemala yang pada akhirnya mendorong migrasi ilegal serta berkontribusi pada organisasi kejahatan transnasional (*Transnational Criminal Organizations* atau TCO). Oleh sebab itu, Amerika Serikat melakukan upaya untuk mengatasi keamanan, pemerintahan, dan penggerak ekonomi migrasi ilegal dan perdagangan gelap orang dan barang untuk melindungi wargan negaranya sendiri. Selain itu, Misi mencari lembaga demokrasi yang lebih kuat, aturan hukum, dan pembangunan ekonomi di Guatemala yang akan meningkatkan stabilitas dan meningkatkan peluang bagi perusahaan Amerika Serikat (States, 2018).

Catatan statistik pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa gelombang pertama imigrasi Guatemala ke Amerika Serikat secara signifikan dimulai pada tahun 1977. Berdasarkan

jumlahnya, Migran Guatemala yang datang ke Amerika Serikat lebih kecil dibanding dengan El Salvador dan negara-negara Migran lainnya. Namun, perubahan persentase dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.599 orang mewakili adanya peningkatan 82% dari tahun sebelumnya, Dimana kenaikan tersebut merupakan salah satu jumlah terbesar masyarakat Guatemala yang pernah diterima dalam satu tahun. Selain itu, 5.093 orang Guatemala ditangkap karena tidak memiliki dokumen yang mewakili 200 persen dari tahun sebelumnya (Jonas & Rodriguez, 2014).

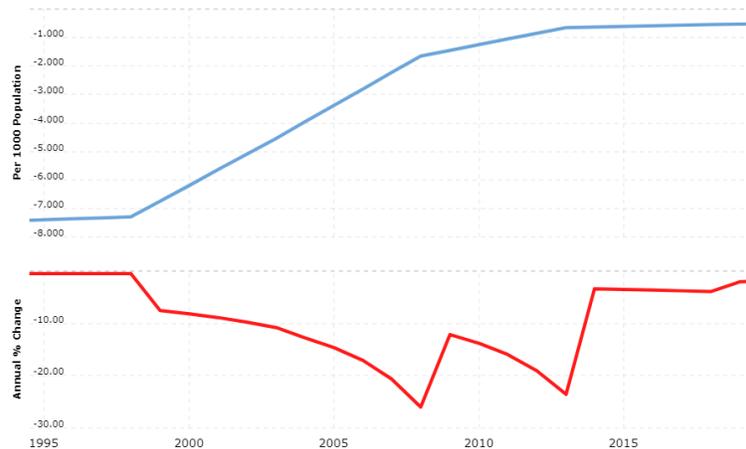
Seperti yang diketahui bahwa aktivitas migrasi Guatemala ke Amerika Serikat ini terus berlanjut hingga saat ini. Alasan utama banyaknya masyarakat Guatemala melarikan diri dari Guatemala dan menjadi Migran ilegal ke Amerika Serikat. Mengingat saat ini masyarakat Guatemala cenderung mengalami kekerasan serta krisis ekonomi yang menyebabkan kelaparan di dataran tinggi barat Guatemala tersebut, Menurut *United States Custom and Border Protection*, mengutip PBB dan Data Keamanan Pangan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (Miroff, 2018).

Menurut pejabat dari Perlindungan Budaya dan Perbatasan Amerika Serikat (CBP), Diketahui bahwa bertahun tahun terjadi panen yang sering tidak menentu, kekeringan sekaligus dampak buruk dari "*coffee rust*" pada industri yang mempekerjakan banyak penduduk pedesaan Guatemala yang pada akhirnya mempercepat eksodus keluarga dari desa yang kehilangan makanan (Sieff, 2018)

Banyaknya migran Guatemala di Amerika Serikat membuat Guatemala menjadi salah satu negara pengirim migran terbesar di Amerika Serikat (Ennis, 2011). Jumlah migran Guatemala meningkat mulai tahun 1995 sampai tahun 2015, hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

Grafik 2.1

Kenaikan Jumlah Migran di Perbatasan Amerika Serikat



Sumber: Macrotrends.net (USA net Migration, 2021)

Berdasarkan data Grafik diatas maka dapat dilihat bahwa kenaikan Migran tersebut sudah ada sejak lama akan tetapi terus meningkat disetiap tahunnya. Tidak hanya itu Amerika Serikat memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan kehidupan Pemerintah Guatemala, dimana Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Guatemala berupa dana sekaligus juga berperan penting dalam CICIG. CICIG atau *Commission Internacional Contra la Impunidad en Guatemala* adalah sebuah komisi bentukan dari PBB dimana untuk menjadi badan anti korupsi di Guatemala yang membantu jaksa Guatemala dalam membongkar kejahatan di Guatemala seperti kartel narkoba, pencucian uang, dan korupsi. CICIG ini didanai oleh PBB sebesar US \$ 15 juta dan sekitar setengah dari itu berasal dari Amerika Serikat (The Economist, 2018).

Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat memulai proses penyelesaian perselisihan yang menyatakan bahwa pemerintah Guatemala melanggar komitmen pekerja CAFTA-DR, keluhan hak-hak buruh pertama yang diajukan berdasarkan perjanjian perdagangan bebas Amerika Serikat. Pada Agustus 2011, Perwakilan Dagang Amerika Serikat secara resmi meminta panel arbitrase. Pada Juni 2017, panel menyimpulkan bahwa meskipun disepakati bahwa Guatemala telah gagal

menegakkan undang-undang ketenagakerjaannya dalam kasuskasus tertentu, Amerika Serikat telah gagal membuktikan bahwa kurangnya penegakan berdampak negatif terhadap perdagangan, seperti yang disyaratkan oleh CAFTA-DR (Morales, 2018).

2.1.4 Hubungan ketergantungan Guatemala terhadap Amerika Serikat

Guatemala dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang baik antara satu sama lain. Hal ini tercermin dari bantuan ekonomi yang terus diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Guatemala. Disisi lain juga, kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat merupakan kerjasama yang penting bagi Guatemala karena Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi mitra strategis Guatemala dalam bidang ekspor dan impor barang. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Presiden Guatemala yaitu Jimmy Morales di pertemuan AIPAC (*American Israel Public Affairs Committee*) tahun 2018 lalu yang mengatakan bahwa hubungan negaranya dengan Amerika Serikat sangat kuat karena Amerika Serikat adalah mitra komersial utama Guatemala yang mana menjadi konsumen utama dari produk Guatemala dan juga menjadi produsen utama barang dan jasa di Guatemala. Banyak perusahaan Amerika Serikat yang dibangun di Guatemala menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Guatemala, perdagangan, dan berinvestasi di Guatemala (Haddad, 2018).

Bantuan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian di Guatemala serta untuk mengurangi tingkat kriminalitas di Guatemala. Diketahui bahwa Guatemala adalah salah satu negara yang memiliki PDB tertinggi di Amerika tengah, namun hal itu berbanding terbalik dengan ekonomi di Guatemala sendiri yang tidak merata sehingga ada beberapa daerah yang masih mengalami kemiskinan. Hal ini disebabkan karena korupsi yang masih merajalela di Guatemala. Dengan adanya korupsi di Guatemala mengakibatkan Guatemala menjadi negara di Amerika Tengah yang memiliki tingkat kriminalitas

tertinggi salah satunya yaitu Guatemala menjadi “jembatan” narkoba ke Amerika Serikat. Dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, bantuan ekonomi dari Amerika Serikat sangat diharapkan oleh Guatemala. Hal ini tercantum dalam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jimmy Morales di AIPAC yang menyatakan bahwa:

“We are also working with the United States in the fight against corruption, a struggle that we support with substantial budget increases for our justice system in Guatemala, and with absolute respect for institutions..... The need to defend democracy in America and the world, also deeply binds us with United States of America. We also maintain a high level of political dialogue with Israel, and our countries have a strong friendship. The United States, Israel and Guatemala share priorities and values: the fight against terrorism, a commitment to border security, the prevention of irregular migration, the fight against drug and arms trafficking, and the protection of human rights. This is why we must stand together and support each other.” (The AIPAC Policy Conference, 2018).

Pernyataan yang disampaikan oleh presiden Jimmy Morales di AIPAC merupakan salah satu kerjasama Amerika Serikat dan Guatemala yang sudah terjalin lamanya. Kerjasama tersebut juga didorong oleh adanya kesamaan dalam komitmen untuk menjaga keamanan perbatasan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Kondisi Guatemala justru mengkhawatirkan ketika dijadikan sebagai Safe Third Country, oleh karenanya berbagai pro dan kontra akan kebijakan Amerika Serikat menarik perhatian berbagai masyarakat internasional.

2.2 Kebijakan Migrasi

Kebijakan Migrasi merupakan salah satu bentuk tindakan suatu negara dalam mengatur lalu lintas para migran yang ingin memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan lebih baik. Selain itu arus migrasi yang terjadi di perbatasan di beberapa negara tujuan para migran memiliki

kebijakan migrasinya sendiri. Seperti kebijakan migrasi Amerika Serikat yang ditujukan kepada para migran dari negara-negara di Amerika Tengah.

2.2.1 Kebijakan Migrasi AS Era Donald Trump

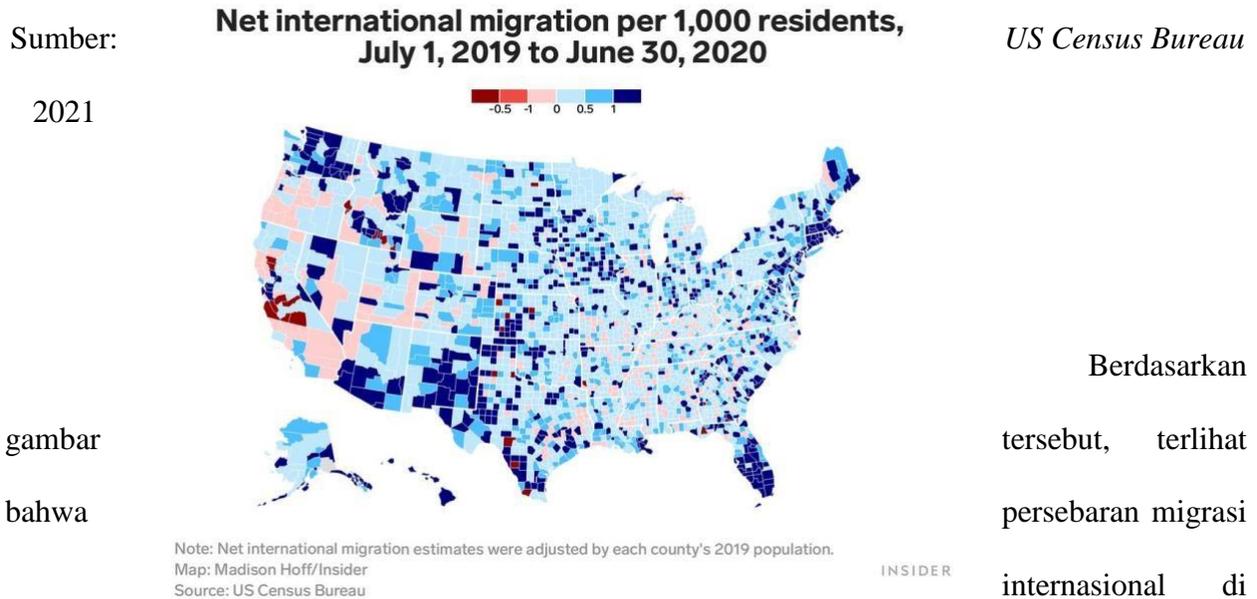
Pemerintahan Donald Trump cenderung terlihat sangat keras terkait isu migran, mengingat isu migran merupakan salah satu isu yang sangat kompleks apabila dibandingkan dengan isu ekonomi, aboris, sistem kesehatan, terorisme, dan hak minoritas dengan lebih dari sekitar 20% daftar pemilih Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pandangan kandidat atas migrasi menjadi faktor penting dalam pilihan mereka (Verea, 2018). Amerika Serikat turut serta menghadirkan undang-undang imigrasi dan kebangsaan (INA) yaitu dengan menetapkan adanya hukum perdata bagi mereka yang berada di Amerika Serikat secara tidak sah atau tanpa status hukum, dimana hukuman ini berlaku bagi mereka yang memasuki Amerika Serikat secara ilegal ataupun bagi mereka yang masuk secara legal namun kemudian melanggar persyaratan penerimaan (Verea, 2018), seperti yang sudah diketahui bahwa dalam masa kepemimpinannya, Donald Trump dianggap tidak berempati terhadap keluarga maupun anak-anak tanpa pendamping yang melintasi perbatasan, bahkan Donald Trump berulang kali mencoba untuk menggambarkan para migran sebagai penjahat yang tidak layak untuk dihormati (Verea, 2018).

2.2.2 *Safe Third Country*

Dalam kerangka prosedur tingkat pertama yang diatur dalam bab 3 petunjuk prosedur suaka *Asylum Procedures Directive* (APD), pasal 27 menyangkut kemungkinan negara-negara anggota untuk menerapkan konsep *Safe Third Country*. gagasan *Safe Third Country*, sebagaimana diatur dalam APD, merupakan konsep bahwa negara-negara anggota dapat mengirim para pencari suaka ke negara ketiga. Jika prosedur tersebut dipenuhi maka dimungkinkan bagi para pencari suaka menerima perlindungan sesuai dengan konvensi 1951 (UNHCR, 1951). Selain itu, dalam

perjanjian kerjasama suaka Amerika Serikat dan Guatemala sepakat dalam Artikel 1 bahwasanya Guatemala menjadi negara tujuan untuk permintaan perlindungan, pemohon perlindungan, sistem dalam menentukan perlindungan (USA, 2019) serta dapat dilihat pada gambar 2.1 yang menjelaskan mengenai migrasi secara internasional yang masuk ke negara-negara bagian di Amerika Serikat.

Gambar 2.1 Peta Persebaran Migrasi Internasional Amerika Serikat Periode 2019-2020



Amerika Serikat mengalami peningkatan di beberapa titik, Dengan demikian adanya peningkatan para migran internasional, Amerika Serikat menghadirkan Guatemala sebagai *Safe Third Country* sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir kemacetan arus migrasi internasional. Dengan demikian, di negara ketiga tersebut pemohon tidak boleh menghadapi risiko penganiayaan atau perlakuan yang melanggar ketentuan terkait dengan hak asasi manusia.

Selain itu, terdapat syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan pemohon yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Pemohon harus memiliki hubungan dengan “negara ketiga yang aman” sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-undang nasional (pasal 27 (2) (a) APD)
2. Mengingat sifat koneksinya, pemohon dimungkinkan untuk pergi ke “negara ketiga yang aman” tersebut (pasal 27 (2) (2) APD)
3. Otoritas penentu seharusnya melakukan pemeriksaan individu untuk memastikan bahwa negara ketiga yang diduga aman bagi pemohon tertentu;
4. Pemohon, setidaknya harus memiliki kesempatan untuk menentang penerapan konsep *Safe Third Country* dengan alasan bahwa ia akan mengalami penyiksaan, tindakan dan hukuman yang kejam serta tidak manusiawi (pasal 27 (2) APD)
5. Jika keputusan hanya didasarkan pada alasan *Safe Third Country*, pemohon harus telah diberitahu tentang keputusan tersebut dan dilengkapi dengan dokumen yang menginformasikan otoritas negara ketiga, dalam bahasa negara tersebut, bahwa permohonan tersebut belum diperiksa di substansi (pasal 27 (3) (a) dan (b))
6. Tersirat dalam pasal 27 (4) APD, bahwa penerapan konsep tersebut dengan syarat pemohon diterima di negara ketiga. Jika pemohon tidak diterima di negara ketiga, sesuai dengan pasal 27 (4) APD, pemohon harus diberikan akses ke prosedur suaka di negara anggota (UNHCR, 1999).

Jika suatu negara tetap ingin mengandalkan konsep *Safe Third Country*, UNHCR akan mempertimbangkan bahwa dalam kondisi tertentu harus dipenuhi untuk memastikan bahwa negara tersebut layak untuk dijadikan sebagai *Safe Third Country*, yaitu mampu dan mau menentukan kebutuhan akan perlindungan internasional dan memberikan perlindungan yang efektif (Bazo, 2015). Dalam upaya memperoleh klaim suaka maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon suaka tersebut seperti dibawah ini

Syarat-syarat pemohon suaka:

- a. Pemohon harus dilindungi dari *refoulement* dan diperlakukan sesuai dengan standar internasional yang diterima di “negara ketiga yang aman”. Keamanan harus dipastikan dalam praktik, dan bukan hanya di bawah kewajiban formal saja.
- b. Pemohon harus memiliki koneksi asli atau hubungan dekat dengan “negara ketiga yang aman”.
- c. Alasan untuk mengajukan klaim suaka terdiri dari sasaran penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan,

Berdasarkan syarat syarat klaim suaka maka dapat dipahami bahwa kegiatan klaim suaka dapat dilakukan di “negara ketiga yang aman” yang telah ditetapkan dimana para pencari suaka tersebut harus memiliki hubungan dengan negara yang dituju seperti para pencari suaka yang berasal dari El Salvador dan Honduras yang memiliki kedekatan geografis dengan Guatemala karena berada di Kawasan Amerika Tengah. Dan Guatemala selaku *Safe Third Country* berhak untuk memberi penilaian apakah ada ancaman serius dari individu tersebut atau tidak sama sekali.

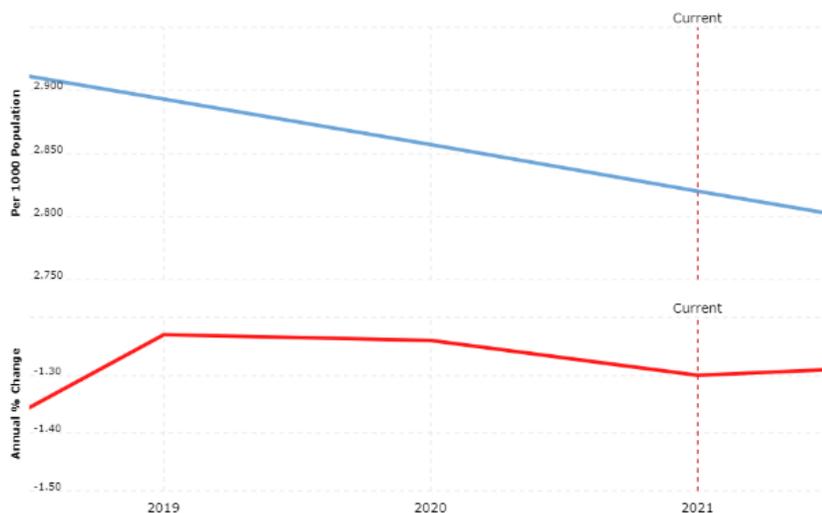
Sebagaimana disoroti oleh pembukaan konvensi 1951 dan sejumlah kesimpulan yang diadopsi oleh Komite Eksekutif UNHCR, solusi yang memuaskan terhadap masalah migran tidak dapat dicapai tanpa kerjasama internasional. Tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan tetap pada negara tempat klaim diajukan. Pengalihan tanggung jawab untuk permohonan suaka mungkin dipertimbangkan dalam beberapa keadaan, tetapi hanya untuk negara-negara dengan sistem perlindungan yang sebanding, berdasarkan kesepakatan yang secara jelas menguraikan tanggung jawab masing-masing (UNHCR, 1951). Sebaliknya konsep *Safe Third Country* seperti yang didefinisikan dalam directive bertumpu pada keputusan sepihak oleh suatu negara untuk meminta tanggung jawab negara lain untuk memeriksa klaim suaka. Oleh Karena itu perjanjian multilateral lebih disukai daripada penerapan konsep tersebut, mengingat dalam perjanjian *multilateral* cenderung menjamin akses ke perlindungan efektif bagi pencari suaka di bawah

kondisi yang ditentukan secara hukum (Kumin, 2017). Dibawah kedua jenis pengaturan tersebut, negara ketiga harus secara tegas setuju untuk menerima pemohon ke wilayahnya dan untuk mempertimbangkan klaim suaka secara substansif dalam prosedur yang adil.

2.2.3 Guatemala sebagai *Safe Third Country*

Guatemala merupakan negara yang berada di Amerika Tengah, saat ini Guatemala menjadi negara yang ditetapkan menjadi *Safe Third Country*, meski demikian Guatemala tetap menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia, sebagaimana dibuktikan oleh lebih dari 190.000 orang tua dan anak-anak yang telah meninggalkan negara itu untuk mencari keselamatan atau kesempatan selama 9 bulan terakhir, pemerintahan Trump telah menekan Guatemala untuk menandatangani perjanjian *Safe Third Country*, meskipun awalnya status negosiasi masih belum pasti. Akan tetapi ditetapkannya Guatemala sebagai *Safe Third Country* mengharuskan warga Honduras dan El Salvador yang mencari suaka di Amerika Serikat untuk dikirim ke Guatemala.

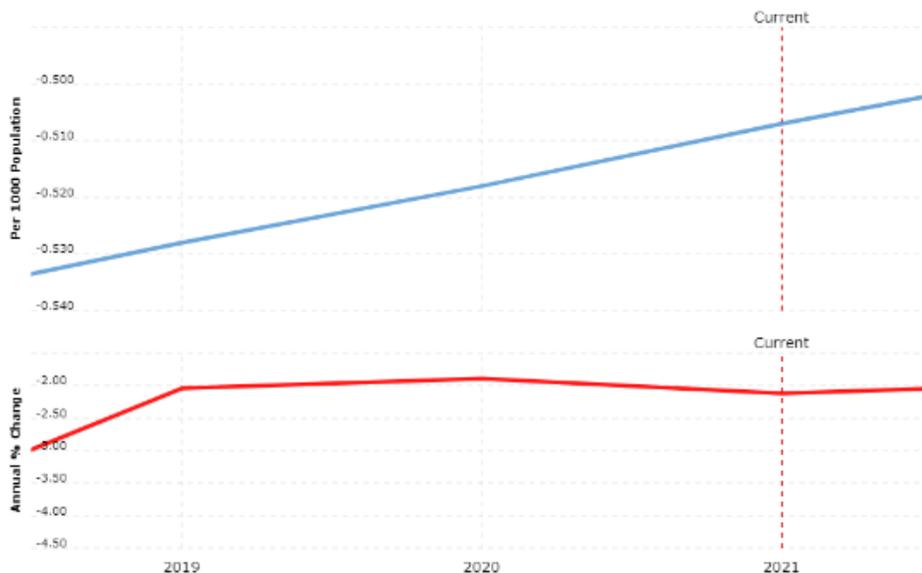
Grafik 2.2 Arus Migrasi Internasional di Amerika Serikat



Sumber : Macro Nets / USA Migration Nets (2021)

Berdasarkan data grafik diatas dapat dilihat bahwa sejak diberlakukannya kebijakan *Safe Third Country* terdapat penurunan jumlah migran yang sangat signifikan. Dimana terjadi kemerosotan arus migrasi di perbatasan Amerika Serikat, mengingat Para migran diperbatasan dialihkan ke Guatemala untuk memperoleh klaim suaka.

Grafik 2.2 Arus Migrasi Internasional Guatemala



Sumber : Macro Nets / USA Migration Nets (2021)

Berdasarkan Grafik-Grafik diatas maka dapat dilihat bahwa Sejak tahun 2019, Arus Migrasi di Amerika Serikat mengalami penurunan, dan disisi lain, arus migrasi di Guatemala mengalami kenaikan. Oleh karena itu, sejak diberlakukannya kebijakan luar negeri Amerika Serikat berupa perjanjian kerjasama suaka yang menetapkan bahwa Guatemala menjadi *Safe Third Country* sebagai bentuk bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Arus Migrasi di Amerika

Serikat mengalami penurunan yang terbilang drastis dapat dilihat bahwa pertumbuhan migran mencapai 80% dari tahun 2019 hingga kebijakan *Safe Third Country* berlangsung.

2.3 Kerjasama Amerika Serikat dan Guatemala

Amerika Serikat dan Guatemala telah menjalin kerjasama melalui perjanjian suaka yang bertujuan untuk mencegah migrasi ilegal, memerangi penyelundupan migran, menekan perdagangan manusia sekaligus menyertakan alternatif bagi banyak orang yang mencari suaka daripada melakukan perjalanan yang panjang. dan berbahaya terutama bagi anak-anak di Amerika Serikat. Donald Trump menyampaikan bahwa “Perjanjian ini akan membawa pada era baru investasi dan pertumbuhan bagi bangsa mereka dan membentuk landasan kerja sama antara kedua negara” (Embassy, 2019)

Selain itu Amerika Serikat juga menjalin kerjasama pemberantasan narkoba dengan Guatemala. Kerjasama tersebut menawarkan model pasar terbatas bagi narkoba seperti yang diterapkan di Guatemala itu sendiri. Dimana hal tersebut bertujuan untuk mengurangi peran kartel. Meski demikian, kepastian hukum harus dilakukan terlebih dahulu jika ingin menerapkan kerjasama tersebut. Kebijakan Amerika Serikat dengan Guatemala tersebut dikaniilai berhasil karena mampu menekan produksi dan perdagangan narkoba melalui pengurangan penawaran narkoba (Foldvary, 2013).